BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap aset yang diberikan kepada masing-masing SKPD yang dikelola. Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengawasan serta perhatian khusus terhadap Barang Milik Daerah tersebut. Agar tercapainya pemberian opini yang baik oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Pengelolaan Aset Daerah dan Peningkatan Kinerja seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana proses Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

Permasalahan yang biasanya terjadi didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dalam kasus Pengelolaan Aset Daerah dimana hal ini akan berakibat dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimers) oleh BPK. Pengelolaan Aset Daerah yang kurang baik atau ketidakjelasannya Pembukuan Aset Daerah sangat mempengaruhi Pencatatan akuntansi dari sebuah SKPD dimana pada saat ini tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) & APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat diharuskan adanya demi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal Pemerintahan Daerah. Faktor internal bisa disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada pada Pengelolaan Aset Daerah yang kurang mumpuni, sistem informasi dan dokumen-dokumen yang telah usang dan tidak tersusun dengan baik dan kurangnya fasilitas saran dan prasarana yang disediakan oleh SKPD-SKPD. Faktor eksternal juga dapat ditemukan dari Pengelolaan Aset yang dilaporkan oleh SKPD lain yang tidak sesuai dengan aset yang dicatat, kurangnya kedisiplinan SKPD-SKPD terkait dalam pelaporan aset yang tepat waktu yang menyebabkan proses penatausahaan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama dalam penyusunan Laporan Pengelolaan Aset yang dibutuhkan, dimana laporan yang berkualitas dan baik adalah laporan yang dapat disajikan dalam waktu yang telah dijadwalkan serca keakuratan dalam laporan tersebut sangat benar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi salah satu wadah yang tepat bagi saya dalam melakukan penelitian magang yang berkaitan dengan *"Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang"*. Bidang aset di BPKAD Kota Padang adalah tempat pengelolaan aset daerah yang tergolong kedalam Barang Milik Daerah (BMD) Kota Padang yang melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dan segala hal yang berkaitan dengan siklus penatausahaan BMD.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.2 Rumusan Masalah

Penatausahaan Barang Milik Daerah tentunya memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Dimana dalam laporan penelitian ini saya akan merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah?
2. Bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah?
4. Identifikasi permasalahan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, kegiatan magang ini memiliki beberapa tujuan diantaranya :

I. Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya pada program studi DIII Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Sebagai salah satu wadah untuk dapat menciptakan tenaga kerja yang telah terlatih yang diinginkan dalam lapangan pekerjaan.

II. Tujuan Khusus

1. Mengetahui mekanisme, prosedur dan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara langsung di BPKA Kota Padang.

2. Menambah wawasan serta pengalaman mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah dan berbagai hal yang terkait tentang Barang Milik Daerah.

1.4 Manfaat Magang

1. Dapat merasakan bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya dengan terjun langsung ke lapangan pekerjaan agar dapat mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Barang Milik Daerah dalam keadaan dunia kerja nyata, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan serta melatih diri dalam berinteraksi dengan orang lain dalam dunia kerja.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I **PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang, Metode Penelitian yang dipakai dalam Kegiatan Magang dan Sistematika Penulisan.

BAB II **LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang Landasan Hukum, Peraturan Perundang-Undang yang terkait Barang Milik Daerah dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Ruang Lingkup Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pihak-pihak yang terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah serta Prosedur dan hal-hal terkait dalam Penatausahaan Barang Mlik Daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB III **GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Pada bagian ini dibahas mengenai keseluruhan hal terkait Badan/Lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan magang. Menguraikan secara umum mengenai visi, misi,tujuan, sejarah dan pembagian tugas dan kewenangan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang.

BAB IV **PEMBAHASAN**

Membahas mengenai Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah secara terperinci dan jelas, serta menguraikan bagaimana proses serta pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah tersebut di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

BAB V **KESIMPULAN**

Berisi kesimpulan perbandingan antara pemahaman teori dengan apa yang didapat selama kegiatan magang berlangsung terkait Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA